

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang unik. Ia memiliki penduduk dengan beragam suku, bahasa, adat istiadat, juga agama. Mayoritas penduduknya yang beragam Islam, namun sistem pemerintahan yang diterapkan adalah demokrasi dan dasar negaranya adalah Pancasila dan UUD 1945. Semua orang, dengan landasan tersebut, memiliki hak dan batasannya masing-masing yang setara sebagaimana bisa ditemukan pada negara-negara modern lainnya. Terdapat kesadaran akan pluralitas atau kemajemukan dari para pendiri bangsa itu sendiri, bahwa Indonesia bukan hanya milik suku Jawa, Betawi, atau Sunda, tapi juga suku-suku lainnya. Indonesia bukan hanya milik umat Islam, meskipun mereka adalah mayoritas, tapi juga milik pemeluk agama-agama lainnya. Dalam kemajemukan tersebut setiap orang pada akhirnya memiliki nilainya masing-masing yang memperkaya khazanah kebudayaan bangsa.¹

Kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan dan kemajemukan bangsa sebagai kondisi faktual di negeri ini penting adanya, agar ia tidak menjadi muasal konflik dan sengketa. Kesadaran ini sangat bernilai agar tidak ada seorang pun mengalami pemaksaan kehendak, terutama dalam pilihan-pilihan yang melibatkan hak dan kebebasan individu, seperti pilihan dan hak politik, ataupun pilihan dan hak dalam berkeyakinan. Hal ini penting disadari, mengingat dalam banyak kasus yang terjadi di negara-negara di mana demokrasi masih diwarnai oleh mayoritas tertentu, kalangan minoritas seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang berkaitan dengan pilihan personal ini bahkan seringkali membuat distingsi mayoritas dan minoritas tidak lagi diletakkan sebagai konsekuensi natural dari masyarakat terbuka (*open society*), tapi sebagai kondisi dan alasan untuk mayoritas guna mendapatkan hak dan keistimewaan lebih dibandingkan kalangan minoritas.²

¹ Muhtar Solihin, *Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila, Cermin Kebangsaan dalam Nuansa Kebhinekaan*, (Bandung: SMILE's Publishing, 2019), hlm. 52-53.

² Karl Popper dengan nada satir misalnya menulis: "*Why is it possible to have a socialist party in a capitalist country if it is not possible to have a capitalist party in a socialist state? The answer is simply that the one is a movement involving all the productive forces of 'a great majority' against 'a*

Negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia, dan sejatinya negara-negara lain yang menerapkan sistem yang sama, menyadari betul bahwa setiap warga negara adalah setara. Pemeluk agama tertentu misalnya tidak lantas bisa mendapatkan hak dan perlakuan lebih karena ia adalah mayoritas. Ataupun halnya penganut pilihan politik tertentu yang tidak boleh diperlakukan berbeda karena ia adalah minoritas. Setiap orang di negara demokrasi ini memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk hidup, beraktivitas, menyatakan pendapat, dan lainnya sejauh ia tidak melanggar hak orang lain ataupun batasan dan peraturan yang ada. Pemahaman akan hak dan kewajiban, serta kesadaran akan kemajemukan, harus dijaga oleh setiap warga negara agar ia bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang utuh dan satu, yakni bangsa Indonesia.

Meski demikian, kondisi ideal berbangsa dan bernegara tersebut akan selalu mendapatkan ujian dan tantangannya tersendiri, terutama ketika persoalan SARA (Suku, Adat, Ras, dan Agama), selalu bisa digiring sedemikian rupa untuk menjadi perangkat politik praktis guna memperkuat kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ada di Indonesia. Agama dan keyakinan yang dibawanya, dalam hal ini bahkan menjadi salah satu perih yang sangat rawan digunakan sebagai isu-isu politis, yang bisa dilihat pada saat berlangsungnya Pemilu/kada. Perintah untuk tidak memilih pemimpin yang berbeda agama atau fatwa tentang haramnya kepemimpinan wanita, selalu menjadi 'wacana' yang terus hadir setiap kali pemilu/kada dilangsungkan di negeri ini.

Agama, dengan kata lain, merupakan salah satu "komoditas terpanas" dalam dunia politik di Indonesia akhir-akhir ini, terutama karena ia bisa berfungsi sebagai perekat distingtif untuk membangun basis dukungan dan sekaligus sebagai perangkat efektif untuk merumuskan identitas politik berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Beberapa kasus terakhir dalam konteks Pemilu-kada di Indonesia misalnya, menunjukkan bagaimana signifikansi pengaruh agama dalam hal penguatan politik identitas di negeri

small minority,' while the other is an attempt of a minority to restore their position of power and privilege by renewed exploitation of the majority. In other words, a ruling 'small minority' can afford to be tolerant, while a 'great majority' cannot afford to tolerate 'a small minority'." Mereka yang mayoritas umumnya sulit untuk menerima kehadiran dan atau mengakui hak-hak minoritas. Lihat Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies, Vol. 1, The Spell of Plato*, (New Jersey: Princeton University Press, 1966), hlm. 293.

ini. Praktik Pilkada di DKI Jakarta, yang melibatkan pertarungan antara pasangan *incumbent* Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno misalnya, adalah praktik politik yang diwarnai dengan beragam isu-isu keagamaan hingga ke titik yang paling ekstrim. Ironisnya, hal ini menjadi semakin rumit ketika Ahok sendiri terikat dalam kasus yang dianggap sebagai bentuk “penistaan agama.” Sikap dan keyakinan penafsiran agama pun pada akhirnya ditarik pada kutub yang saling bertolak belakang, baik kiri ataupun kanan, yang saling menyalahkan satu dan lainnya. Mereka yang mendukung Ahok berarti mereka yang dianggap melanggar pesan dan ajaran Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan muslim, ataupun mereka yang menganggap bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama atas pernyataan yang dikeluarkannya di Pulau Seribu. Sebaliknya, mereka yang mendukung Anies, dianggap sebagai mereka yang sudah menjadikan agama sebagai komoditas dalam jual-beli politik dan kekuasaan.³

Dalam perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat terkait pilihan politik dan isu-isu yang melingkarinya, seperti kasus hukum dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terdapat fenomena yang perlu dicatat, yakni isu-isu berbasis SARA, terutama agama, masih mendapat tempat di masyarakat Indonesia. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi bahkan di negara maju sekalipun. Ada penguatan politik berbasis identitas yang mengemuka beriringan dengan Pemilu/kada yang dilangsungkan, khususnya identitas keagamaan.⁴

³ Setiap kelompok berusaha mempertahankan pendapatnya sendiri, hingga alih-alih berangkat dari keingintahuan, masyarakat umum bahkan sudah terlanjur didorong untuk berangkat dari batasan setuju atau ketidaksetujuan terhadap, khususnya kasus “penistaan agama” yang dilakukan Ahok. Stigma pun tidak terelakkan: jika anda mendukung Ahok dan menyatakan bahwa tidak ada “penistaan agama” yang dilakukan olehnya, maka anda adalah kalangan “munafik-liberal” yang tidak peduli dengan al-Qur’an serta agama Islam; sebaliknya, jika anda meyakini bahwa Ahok benar-benar melakukan tindakan “penistaan agama”, maka anda adalah kalangan “bigot-radikal” yang tidak mau menerima tafsiran dan pendapat orang lain serta tidak mau mengerti bahwa kasus Ahok ini tidak murni terkait agama karena ada kepentingan politis yang besar di baliknya. Stigma distingtif ini semakin bertambah tajam, ketika ada “pihak-pihak” yang ingin ikut bermain dan membawa kepentingannya sendiri seiring perubahan konstelasi sosial-politik yang ada. Kondisi seperti ini, jika ia terus berlanjut, jelas umat Islam di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia itu sendiri, bisa saja harus menghadapi ancaman disintegrasi yang nyata. Lihat Rohmatul Izad, “Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016),” dalam *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(1): 171. DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0101-10.

⁴ Pemilu di Amerika Serikat yang pada akhirnya menghasilkan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru misalnya menunjukkan dengan jelas bagaimana kampanye identitas politik yang dilakukan oleh Trump ternyata berdampak signifikan terhadap kemenangannya. Pernyataan-pertanyaan Trump dalam kampanyenya tentang anti muslim, anti imigran, tentang sekolah-sekolah

Penguatan politik identitas ini memang bukan yang baru, mengingat jika ditarik secara luas, setiap pilihan politik yang dibuat akan selalu menjadi proses perumusan identitas seseorang. Hal ini, mengutip Richard D. Parker, sejatinya bisa menjadi latihan yang baik untuk kebebasan politik demokratis (*an exercise of democratic political freedom*) bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.⁵ Dalam konteks ini, Richard D. Parker mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat lima tesis utama mengapa politik identitas tersebut sebenarnya bisa menjadi sarana latihan untuk penguatan kehidupan berdemokrasi masyarakat modern, yakni:

1. Setiap politik adalah politik identitas (*all politics is identity politics*). Politik adalah upaya perumusan tentang siapa kita (*who we are*), atau kita ingin menjadi apa (*hope to be*), atau kita ingin terlihat seperti apa (*hope to be seen to be*). Pilihan ini didorong oleh imajinasi dalam diri yang seringkali tidak terlihat di permukaan karena ia merupakan suatu cara konstruksi atau presentasi diri (*self-construction and self-presentation*). Dalam politik, setiap orang akan berusaha untuk membuat perbandingan (komparasi) dan pilihan di antara nilai-nilai dan kepentingan yang dimiliki. Preferensi untuk penentuan pilihan dan komitmen yang dibuat inilah yang kemudian menjadi identitas diri.
2. Politik identitas juga dapat bekerja sebaliknya, yakni ia dapat meredam atau menutupi kebebasan politik yang demokratis (*identity politics can dampen or smother democratic political freedom*). Politik yang demokratis itu sendiri terkadang tampak seolah mendukung kecenderungan ini. Dalam hal ini, pertanyaan yang timbul adalah; politik identitas seperti apa, apa aspek dari politik identitas, yang bersifat patologis untuk kebebasan politik yang demokratis dan darimana ia muncul?
3. Beberapa kalangan mungkin akan menjawab bahwa patologi politik identitas ini muncul karena adanya stereotif-stereotif tertentu, atau karena politik

engineering di Amerika yang penuh dengan para pelajar dari Asia, atau tentang perlunya penegakan supremasi kulit putih, seolah berhasil menyuarakan keresahan dan keinginan sebagian besar masyarakat Amerika dan membentuk preferensi politik penting bagi mereka untuk mendukung Trump. Laporan The Guardian yang diambil dari tulisan Amy Chua dalam Political Tribes, menunjukkan dengan jelas bagaimana proses perumusan identitas politik oleh Trump ini menjadi faktor terpenting kemenangannya. Lihat dalam: <https://www.theguardian.com/society/2018/mar/01/how-americas-identity-politics-went-from-inclusion-to-division>

⁵ Richard D. Parker, "Five Theses on Identity Politics," dalam *Journal of Law & Public Policy*, Vol. 29, No. 1, (Harvard University, 2005), hlm. 53.

identitas lebih cenderung menggambarkan perbedaan dan perpecahan dibandingkan persamaan dan ikatan. Namun hal ini adalah kesalahan, karena politik identitas adalah persoalan konstruksi diri dan cara seseorang menghargai dirinya (*self-regarding*). Jikapun ada perbedaan yang lebih muncul, atau adanya keluhan yang menyertai pilihan seseorang, maka hal itu merupakan konsekuensi alamiah yang seharusnya dijadikan dorongan untuk latihan berdemokrasi.

4. Politik identitas bisa menjadi patologi demokrasi ketika ia digunakan untuk mematikan, bukan menghidupkan keterbukaan konflik politik demokratis (*the openness of democratic political conflict*). Dalam hal ini perlu dipahami bahwa setiap politik identitas seringkali bersifat resisten dan sulit untuk dirubah. Setiap kali pilihan dirumuskan, maka orang pada dasarnya menjadikan pilihannya tersebut sebagai kerangka dan landasan gerakannya. Hal ini bisa membawa orang pada bentuk demonisasi (*demonization*), ketika pilihan politik seseorang membawanya pada tindakan-tindakan penerimaan praduga dan penyalahan pihak lain tanpa mau berpikir lagi. Ia juga dapat membawa masyarakat pada distingsi negatif yang dirumuskan dalam karakterisasi kita dan mereka, kelompok A dan kelompok B, dan hal-hal lain yang tidak lagi sehat untuk pembelajaran demokrasi.
5. Salah satu identitas problematik yang justru seringkali muncul pada iklim politik saat ini adalah istilah mayoritas dan minoritas. Istilah ini pada awalnya mungkin hanya digunakan untuk merujuk pada kesamaan karakter atau dimensi tertentu dari pilihan politik yang ada, namun ia menjadi persoalan ketika ia digunakan untuk penindasan kelompok tertentu. Persoalan ini pula yang tengah dihadapi oleh banyak negara dengan sistem demokrasi.⁶

Dalam konteks Indonesia sendiri, politik identitas ini menjadi metode praktis untuk menentukan keterlibatan dalam demokrasi. Ketika semua partai politik atau tokoh pemimpin menawarkan konsep pembangunan dan atau pemerintahan dengan nilai-nilai keunggulan yang setara, atau ketika kepercayaan terhadap janji-janji politis tidak

⁶ *Ibid.*, hlm. 54-57.

lagi ada, maka memilih berdasarkan karakter tertentu, terutama keagamaan, menjadi cara yang dianggap paling beralasan untuk merumuskan identitas diri.

Perumusan identitas berdasarkan pertimbangan karakter tertentu, terutama agama, dan tidak lagi pada pertimbangan rasional dan otonom, pada dasarnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mudah terjebak pada mentalitas kawanan (*mob mentality*).⁷ Mentalitas kawanan ini secara praktis dapat diartikan bahwa seseorang merumuskan pilihan politis tertentu karena orang-orang sekelilingnya berpendapat atau memilih hal tersebut. Perilaku seperti ini banyak ditemukan pada perilaku masyarakat dalam memilih pimpinan, ataupun dalam menyikapi suatu persoalan, seperti misalnya beberapa kasus Pilkada di Indonesia. Banyak orang barangkali tidak mengerti persoalan yang sebenarnya terjadi, namun orang sudah terlanjur digiring dengan isu dan wacana yang dikembangkan di masyarakat bahwa tokoh A adalah pemimpin yang buruk, atau tokoh B adalah pemimpin yang Islami. Mereka yang terjebak pada mentalitas kawanan atau kerumunan ini bahkan tidak lagi menyadari bahwa pilihan mereka tidak lagi lahir dari kesadaran otonom, melainkan semata mengikuti arus yang ada. Dalam hal ini, Le Bon menjelaskan bahwa:

“The disappearance of conscious personality and the turning of feelings and thoughts in a definite direction, which are the primary characteristics of a crowd about to become organised, do not always involve the simultaneous present of a number of individuals on one spot. Thousands of isolated individuals may acquire at certain moments, and under the influence of certain violent emotions—such, for example, as a great national event—the characteristic of a psychological crowd. It will be sufficient in that case that a mere chance should bring them together for their acts to at once assume the characteristics peculiar to the acts of a crowd. At certain moments half a dozen men might constitute a psychological crowd, which may not happen in the case of hundreds of men gathered together by accident. On

⁷ Istilah *mob mentality* ini juga memiliki beberapa penyebutan lain, seperti *herd mentality* atau *groupthink*. Istilah ini berasal dari Psikolog Prancis, Gabriel Tarde dan Gustave Le Bon pada abad ke-19, yang berusaha menjelaskan bagaimana perilaku seseorang seringkali dipengaruhi oleh kelompok di mana mereka tergabung di dalamnya. Dalam bidang Psikologi sendiri, *mob mentality* ini juga merujuk pada istilah *psychological crowds*. Gustave Le Bon misalnya menulis: *“special characteristics of psychological crowds—The turning in a fixed direction of the ideas and sentiments of individuals composing such a crowd, and the disappearance of their personality. The crowd is always dominated by considerations of which it is unconscious. The disappearance of brain activity and the predominance of medullar activity—the lowering of the intelligence and the complete transformation of the sentiments. The transformed sentiments may be better or worse than those of the individuals of which the crowd is composed. A crowd is as easily heroic as criminal.”* Lihat Gustave Le Bon, *The Crowd, A Study of The Popular Mind*, (New York: Dover Publications, 2012), hlm. 2.

the other hand, an entire nation, though there may be no visible agglomeration, may become a crowd under the action of certain influences.”⁸

Namun demikian, penguatan politik identitas sebenarnya tidak melulu mengandung implikasi negatif dalam tatanan sosial-politik masyarakat modern. Penjelasan Richard D. Parker sebelumnya, meski lebih banyak mengungkapkan kekhawatiran akan kebangkitan politik identitas dan bahaya konflik horizontal yang dibawanya, sebenarnya bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat, sekaligus memberikan mereka pelajaran berharga untuk penguatan basis demokrasi ke depannya.

Penguatan politik identitas ini sebenarnya bisa membantu masyarakat yang selama ini belum memiliki preferensi politik yang jelas, ataupun belum memiliki kesadaran bahwa ada kesalahan epistemologis mendasar jika mereka memilih pemimpin berdasarkan “identitas” rasial tertentu,⁹ bukan karena kapabilitas dan integritas personalnya, yang tidak ada kaitan fungsional sama sekali dengan keberhasilannya dalam memimpin. Ketika mereka menyadari bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh faktor identitas sempit, maka ia bisa menjadi pelajaran berharga pada masa depan kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Namun demikian, pada tahap awal, ia tentu saja lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang itu bisa membawa dampak yang sangat mahal untuk dibayar. Tampilnya beberapa tokoh politik ataupun calon-calon pemimpin dengan membawa jargon identitas tertentu untuk meraih dukungan masyarakat, tanpa harus bersusah payah membawa program unggulan ataupun membuktikan kapabilitas dirinya sebagai pemimpin yang layak untuk dipilih, dapat membawa pada kondisi kehidupan bersama yang alih-alih mendapatkan perbaikan, justru semakin terpuruk karena kesalahan mendasar seperti ini. Penguatan politik identitas ini sepertinya juga menjadi cara baru

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ Kesalahan epistemologis ini misalnya pernah diungkapkan oleh Amy Chua ketika ia menganalisis pemilu di Amerika Serikat. Amy menulis: “*The new exclusivity is partly epistemological, claiming that out-group members cannot share in the knowledge possessed by in-group members (“You can’t understand X because you are white”; “You can’t understand Y because you’re not a woman”; “You can’t speak about Z because you’re not queer”). The idea of “cultural appropriation” insists, among other things, “These are our group’s symbols, traditions, patrimony, and out-group members have no right to them.”* Lihat Amy Chua, *Political Tribes, Group Instinct and The Fate of Nations*, (New York: Penguin Press, 2018), hlm. 10.

bagi banyak pengamat untuk menyederhanakan perspektif mereka dalam menganalisis bagaimana kehidupan sosial-politik Indonesia hari ini. Tokoh yang berasal dari lingkungan komunitas/kelompok tertentu misalnya, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dari komunitas atau kelompoknya, ataupun masyarakat lain yang memiliki kesamaan haluan dalam hal identitas ajaran keagamaan. Pada titik ini, beberapa organisasi kemasyarakatan besar yang berbasis agama, seperti NU (Nahdlatul Ulama) atau Muhammadiyah, jelas memiliki peluang besar untuk ikut bermain dalam dunia politik, khususnya ketika identitas keagamaan menjadi identitas signifikan untuk preferensi politik masyarakat Indonesia hari ini.

Tampilnya beberapa tokoh NU ataupun Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya dalam pentas politik memang sudah ada dalam beberapa dekade terakhir kehidupan politik di Indonesia. Namun, penggunaan identitas keagamaan dan afiliasi komunal dengan NU atau Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, justru semakin mendapatkan momentumnya pada situasi sosial-politik pasca Pemilihan Presiden pada tahun 2014 dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017.¹⁰

Terkait organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi dengan jumlah anggota dan simpatisan terbesar di negeri ini, tentu memiliki daya pikat yang besar bagi banyak politisi, baik dari kalangan di luar NU, ataupun dari lingkungan NU itu sendiri. Dalam konteks Pilkada, afiliasi dengan NU seolah menjadi modal penting dari seorang politisi untuk meraup suara massa, khususnya kalangan Nahdliyin. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab ada beberapa faktor penting mengapa afiliasi dengan NU bisa menjadi modal politik berharga, di antaranya:

1. NU merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar dengan pengikut lebih dari puluhan juta masyarakat Indonesia. NU merupakan lumbung suara yang sangat besar bagi politisi di negeri ini.¹¹

¹⁰ Preferensi politik berdasarkan identitas keagamaan ini semakin mengalami penguatan pasca Pemilu-kada tersebut. Survey yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di delapan provinsi, delapan kota menunjukkan adanya perubahan faktor yang sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Poin pengaruh agama dalam politik yang tadinya banyak bergerak di bawah 50 persen, menunjukkan kenaikan signifikan pasca Pilkada DKI Jakarta. Sementara faktor kesukuan yang biasanya besar, justru mengalami penurunan sebagai preferensi politik masyarakat. Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/27/23485101/setelah-pilkada-dki-preferensi-politik-masyarakat-lekat-dengan-faktor-agama>.

¹¹ Alvara Research Center pernah melakukan penelitian untuk mendapatkan estimasi jumlah warga NU dan Muhammadiyah. Estimasi ini berdasarkan survei nasional bertajuk “Potret Keberagaman

2. NU secara kultural membawahi banyak institusi Pesantren yang jumlahnya mencapai kurang lebih 15 ribu Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Kultur Kyai dan Pesantren ini bisa menjadi preferensi politik bagi masyarakat di lingkungan Pesantren atau daerah di mana Pesantren tersebut berdiri.
3. NU dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan yang hampir tidak pernah bersikap melawan pemerintah, meskipun tidak berarti kehilangan sisi kritisnya terhadap pemerintah itu sendiri. Hal ini penting untuk diingat bahwa apapun kebijakan pemerintah, ketika warga NU mengamini, maka ia menjadi representasi umum penerimaan masyarakat akan kebijakan tersebut. Suara NU akan selalu didengar terlepas dari siapapun yang berada di puncak kekuasaan.

NU, sebagai sebuah organisasi memang tidak meletakkan dirinya sebagai organisasi politik, meskipun pada awalnya sempat terjun dalam dunia politik.¹² Namun demikian, ada banyak kader NU yang terjun dalam dunia politik dan pemerintahan yang membuat NU tetap dianggap tidak bisa sepenuhnya lepas dari dunia politik. Anggapan tentang kembalinya NU pada politik praktis jelas bertentangan atas sikap NU yang ingin kembali ke khittahnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan isu-isu sosial keagamaan pada umumnya, sebagaimana hasil keputusan Mukhtar NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984, tentang perlunya NU untuk kembali ke khittah 1926-nya.

Muslim Indonesia” terhadap 1626 penduduk muslim Indonesia yang berusia 17 tahun keatas di 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Desember 2016. Estimasi ini dibagi menjadi dua kategori, Afiliasi Ormas, dan Keanggotaan Ormas. Afiliasi ormas digunakan untuk mengidentifikasi mereka merasa dekat dengan ormas yang mana, sementara Keanggotaan ormas digunakan untuk mengukur mereka mengaku sebagai anggota ormas yang mana. Hasilnya, Penduduk muslim Indonesia 50,3% mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan 14,9% mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah, sisanya tersebar ke ormas-ormas yang lain dan tidak berafiliasi ke Ormas manapun. Sementara dari sisi keanggotaan, 36,1% mengaku menjadi anggota NU, dan 6,3% mengaku menjadi anggota Muhammadiyah. Dari survei ini juga menunjukkan 54,6% penduduk muslim Indonesia mengaku tidak menjadi anggota ormas manapun. Jumlah yang lebih pasti pernah disebutkan oleh KH. Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa warga NU berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Sementara Gus Dur menyebutkan bahwa 50% orang Indonesia adalah warga NU, yang berarti sekitar 120 juta jiwa. Lihat Muhammad Sobary, *NU dan Keindonesiaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 107.

¹² NU pernah memenangkan perolehan suara empat besar dalam pemilu 1955 dan menjadi tiga besar dalam pemilu 1971. Namun pada fase berikutnya suara NU semakin surut, meskipun kemudian melalui PKB berhasil mengantarkan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) menjadi Presiden RI ke-4 berdasarkan sidang MPR tahun 1999.

Slogan kembali ke khittoh 1926 sendiri sebenarnya bukan melarang warga Nahdliyin untuk berpolitik. Mereka diberikan ruang untuk berpolitik sejauh tidak mengatasnamakan NU ataupun membawa NU dalam aktivitas politik praktis. Politik NU sesuai khittohnya adalah politik kebangsaan, yakni bagaimana NU bisa berperan dalam berbagai kegiatan demi tujuan dan kepentingan bangsa yang jelas lebih besar dari sasaran politik praktis temporal. Sikap politik NU Sebagai *jam'iyah dîniyyah ijtimâ'iyah* terbesar dapat dimaknai sebagai gerakan yang mengedepankan kepentingan umum (bangsa) daripada kepentingan pribadi (golongan/kelompok). Prinsip NU dalam menyikapi kepentingan bangsa pada umumnya dilandaskan pada kaidah *tashorruful imam ala ra'iyah manuthun bil mashlahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat).

Tujuan seperti ini dalam praktiknya tentu sulit untuk diwujudkan, mengingat NU sebagai organisasi terbesar memang selalu berada di dalam tarikan-tarikan kepentingan politik baik dari kadernya sendiri maupun orang luar. Karena itu pula, menepikan keberadaan NU dalam konteks politik Indonesia, meski secara ideologis organisatoris NU sudah dikembalikan pada khittohnya, adalah sebuah kesalahan. Peran NU dalam politik ini tetaplah besar, dan bahkan semakin mendapatkan signifikansinya ketika kondisi politik hari ini dipenuhi dengan pertentangan ideologis yang mengerucut pada pertarungan identitas politis, yang tidak jarang selalu berkaitan dengan agama itu sendiri.

Dalam peta perpolitikan yang lebih mengedepankan identitas, yang umumnya akan ditampilkan pula dengan berbagai istilah, simbol, dan penanda SARA, maka NU yang selama ini memang dikenal dengan ajaran Islamnya yang moderat, mampu mengakomodir berbagai perbedaan perspektif terkait interpretasi keagamaan, akan sangat dibutuhkan untuk menekan berbagai potensi konflik horizontal di masyarakat sebagai akibat dari pertarungan kepentingan politik identitas tersebut.¹³ Tuntutan agar NU bisa berdiri sebagai penengah berbagai persoalan di masyarakat yang timbul

¹³ Fakta yang ada menunjukkan bahwa pertarungan politik yang terjadi saat ini dapat dirujuk pada pertarungan antara dua kubu utama, yakni pemegang kekuasaan sekarang dengan pihak oposisi. Ironisnya konflik kepentingan kekuasaan pada tingkat elite ini tidaklah sesederhana pertentangan antar pendukung keduanya. Pada level akar rumput, konflik yang ada lebih dipenuhi dengan ujaran kebencian dan sebaran paham-paham tertentu, berita-berita hoax, ataupun isu-isu intoleransi dan SARA, yang semua itu rentan memecah belah persatuan bangsa.

sebagai dampak dari politik Indonesia yang kurang sehat ini menjadi semakin urgen terutama dalam konteks Pilkada yang akan dilangsungkan secara serentak pada tahun 2018 di berbagai wilayah di Indonesia. Secara lebih khusus, peran NU ini penting, terutama karena ia merupakan organisasi kemasyarakatan dengan basis agama dan corak ideologis tertentu, yang diharapkan bisa menjadi penengah dan pihak yang tetap waras di tengah konflik dan kekacauan sikap para pendukung arus politik utama yang ada, di mana agama seringkali dipergunakan untuk melegitimasi kepentingan dan hasrat politiknya

Dalam hal ini, salah satu daerah yang melangsungkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2018 adalah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti perhelatan Pilkada di Subang ini, yakni pasangan H Ruhimat - Agus Masykur Rosyadi yang diusung oleh koalisi PKS, PAN, Gerindra, PPP, Demokrat, dan Nasdem, pasangan petahana Imas Aryumningsih - Sutarno yang didukung Golkar dan PKB, dan pasangan Dedi Junaedi - Budi Setiadi yang diusung oleh PDI-P.¹⁴ Pertarungan politik yang akan terjadi di Pilkada Subang ini akan menarik, mengingat salah satu partai yang menjadi pengusung calon petahana adalah PKB, yakni Partai Politik yang dikenal sebagai Partainya warga NU, partai PDI-P yang saat ini memiliki kedekatan dengan NU terutama karena rezim pemerintahan saat ini (PDI-P), dan koalisi PAN, PKS, Gerindra, sebagai partai politik yang justru banyak berhaluan dengan NU, baik secara ideologis, pandangan terhadap kebijakan pemerintah, ataupun dalam hal menyikapi berbagai isu-isu publik lainnya.¹⁵

Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai kabupaten dan kota pada tahun 2018 ini, khususnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, peran NU dan politik kebangsaan yang diusungnya kembali mendapati ujian. Apakah ia mampu mempertahankan prinsip dan kebijakan organisasinya, ataukah sebaliknya, ia justru dibawa oleh para politisi ataupun kader-kadernya sendiri dalam kepentingan politik praktis. Akan menarik pula untuk mengikuti bagaimana kelanjutan pertarungan

¹⁴ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/04/17/pilbup-subang-2018-di-tengah-pusaran-ott-kpk-422944>

¹⁵ Mudah untuk dilihat bahwa ada banyak tokoh NU yang seringkali mendapatkan serangan dan kecaman dari tokoh-tokoh politik yang berasal dari ketiga partai tersebut. Salah satu yang paling santer adalah kecaman mereka atas Gus Staquf (Yahya Cholil Staquf) yang berkunjung ke Israel. Tokoh NU lainnya yang sering mendapatkan kritikan hingga celaan, khususnya di media sosial dari umumnya para simpatisan ketiga partai ini adalah KH. Nadirsyah Hosein dan KH. Musthofa Bisri (Gus Mus).

ideologis antara NU dan beberapa Partai Oposisi, khususnya PKS, PAN, dan Gerindra, terutama di level akar rumput yang seringkali dipenuhi dengan sentimen-sentimen keagamaan, hoax, dan isu-isu yang membawa bahaya laten perpecahan bangsa.

Penelitian ini pada dasarnya dirancang untuk menganalisis hal tersebut secara kritis, yakni bagaimana peran, pengaruh, dan praktik politik para tokoh dan organisasi Nahdlatul Ulama di Kab. Subang, dalam hubungannya dengan fenomena politik identitas yang ada di Indonesia, terutama selama proses Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Subang tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan politik identitas, serta bagaimana peran, pengaruh, dan praktik politik organisasi Nahdlatul Ulama yang terdapat di Kabupaten Subang dalam kancah politik, khususnya pada proses Pilkada yang berlangsung di Kabupaten Subang, Jawa Barat tahun 2018. Penekanan peran dan gerakan NU sendiri berkaitan erat dengan fenomena politik identitas yang sekarang marak terjadi, mulai dari tingkat pusat hingga ke level akar rumput (masyarakat umum). Secara lebih detil, penelitian ini difokuskan dalam pertanyaan-pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam peta politik di Kabupaten Subang, Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Subang, Jawa Barat?
3. Apa yang dimaksud dengan politik identitas dan bagaimana politik identitas tersebut melibatkan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang, Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara kritis perihal:

1. Peran organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam peta politik di Kabupaten Subang.

2. Pengaruh organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
3. Politik identitas keagamaan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis sebagai bahan masukan untuk gerakan praksis ormas Islam, khususnya NU. Secara lebih mendetail, kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat bangunan teoritis Studi Keagamaan sebagai disiplin ilmu yang selalu bersentuhan dengan realitas sosial yang dinamis dan terus berkembang.
- b. Menambah khazanah Studi Agama dalam kerangka kajian lintas bidang, terutama dengan kajian studi ilmu politik (*political science*), kajian organisasi (*organizational theory*), dan analisis budaya (*cultural studies*).
- c. Memperluas khazanah studi tema keagamaan sebagai inti kajian dari Konsentrasi Studi Agama (*religious studies*).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka pikir baru bagi para praktisi ormas, khususnya NU dan pemuka agama dalam menghadapi tantangan politik dan dakwah di masa mendatang.
- b. Menjadi kerangka referensi bagi para praktisi politik dan pegiat studi keagamaan dalam menciptakan ruang yang lebih baik untuk dialog agama dan politik.
- c. Memberikan wawasan baru bagi masyarakat secara luas tentang bagaimana menyikapi praktik politik identitas, khususnya identitas keagamaan (Islam) yang terdapat dalam konteks Pemilu di berbagai daerah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang NU (Nahdlatul Ulama), khususnya yang berkaitan dengan peran, pengaruh, dampak, dan gerakan NU serta warganya dalam bidang politik pada dasarnya sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian bebas ataupun akademis. Hal ini terutama disebabkan sifat dari peran dan gerakan NU dalam bidang politik yang cukup dinamis. Penelitian tentang NU terkadang juga harus mengikutsertakan tokoh-tokoh tertentu di dalamnya, khususnya para Kyai atau ulama. Hal ini berarti melibatkan subjek yang sangat banyak dan beragam. Karena itu pula, penelitian yang dilakukan pun seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Keragaman ini tentu saja bukanlah sebuah kelemahan, sebaliknya, ia bisa memberikan tambahan nilai pada khazanah studi keislaman secara khusus dan studi interdisiplin dengan subjek NU secara umum.

Adapun penelitian tentang NU yang secara khusus membahas tentang identitas politik NU dalam konteks politik di Indonesia, maka terdapat beberapa penelitian yang sedikit banyak bersentuhan dengan tema tersebut, namun belum secara khusus membahas aspek identitas ke-NU-an dalam kerangka teoritis politik identitas spesifik. Beberapa penelitian yang ada, misalnya lebih banyak berbicara tentang peran NU dalam politik dengan memasukkan bahasan tentang identitas ke-NU-an, namun dalam kerangka teori yang lebih didasarkan pada studi keagamaan (*religious studies*) atau studi budaya (*cultural studies*). Berikut ini adalah contoh beberapa penelitian terdahulu yang membahas bagaimana eksistensi NU dalam kancah politik, dan secara umum membahas juga perihal identitas keagamaan dalam politik, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musthofa Sonhadji, dengan judul: “*Hubungan Politik Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Orde Baru,*” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001).

Penelitian ini menganalisis bagaimana hubungan Islam dengan politik secara umum, untuk kemudian membaca bagaimana hubungan yang dibangun oleh NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan rezim Orde Baru dalam konteks politik. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa rezim Orde Baru menerapkan pola atau corak politik akomodatif kepada organisasi keagamaan, terutama NU. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana corak politik akomodatif tersebut diterapkan oleh rezim Orde Baru

terutama kepada organisasi NU. Berdasarkan rekonstruksi historis yang dilakukan peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa NU ternyata tidak menjadi bagian dari politik akomodatif Orde Baru. Sebaliknya, NU lebih banyak dipinggirkan, karena kecurigaan dan ketakutan pemerintah akan potensi NU dengan massanya yang besar untuk menggulingkan pemerintahan.

Perbedaan utama penelitian yang dilakukan oleh Musthofa Sonhadji dengan penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini tidak membahas keberadaan NU di bawah rezim Orde Baru saja, tapi juga periode kekuasaan atau pemerintahan sebelum dan setelahnya. Penelitian ini, dengan kata lain, berupaya memotret bagaimana perjalanan NU dalam sejarah politik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan identitas organisasi—dengan berbagai kebijakan dan putusan di dalamnya—serta corak keagamaannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Himayatul Ittihadiyah, dengan tajuk: *“Merunut Identitas Islam Indonesia, Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI, dan MMI,”* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Himayatul Ittihadiyah ini pada dasarnya berupaya untuk membaca bagaimana proses identifikasi diri menjadi dasar untuk timbulnya kesadaran diri dalam bertindak, yang kemudian membentuk identitas keadilan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan, terutama politik. Meski demikian, penelitian ini lebih memotret bagaimana identitas diri tersebut dirumuskan dalam konteks kelompok sosial keagamaan tertentu, khususnya yang terdapat pada beberapa organisasi sosial keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, HTI, dan MMI, serta bagaimana identitas ini berperan atau memberikan dampak pada medan politik di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menyimpulkan bahwa organisasi NU dan Muhammadiyah yang merepresentasikan corak Islam yang lebih humanis dan toleran, lebih banyak menonjolkan identitas ke-Indonesia-an dibandingkan identitas Islam dalam politik. Sebaliknya, organisasi HTI dan MMI, yang merepresentasikan corak Islam yang eksklusif, lebih berupaya menonjolkan identitas Islam dibandingkan identitas Indonesia dalam politik.

Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Himmayatul Ittihadiyah tersebut, adalah bahwa penelitian ini lebih diarahkan untuk membaca bagaimana nilai-nilai keagamaan tradisional—Islam inklusif dan toleran—yang pada akhirnya membentuk identitas NU, bisa menjadi basis untuk mendapatkan pengakuan publik oleh para politisi yang ada, sebagai strategi yang seringkali diterapkan dalam politik identitas. Dengan kata lain, penelitian ini lebih dikhususkan untuk membahas identitas keagamaan dan politik NU, dengan membaca sejarah perjalanan NU dari awal berdirinya, Orde Lama, Orde Baru, hingga periode reformasi dan setelahnya sampai penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini tidak berupaya untuk membandingkan organisasi NU dengan organisasi sosial-keagamaan lainnya, baik yang berkaitan dengan corak keagamaan ataupun gerakan politik yang dibangun. Meski demikian, beberapa hal terkait corak pemikiran keagamaan NU tetap menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Riza, dengan judul: *“Eksistensi Nahdlatul Ulama dalam Dunia Politik pada Masa Transisi Kekuasaan di Indonesia (1998-2004),”* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana kondisi politik Indonesia pada masa transisi kekuasaan, khususnya setelah kejatuhan rezim Orde Baru menuju era Reformasi. Bagi peneliti, masa transisi ini telah membawa perubahan fundamental pada wajah politik Indonesia. Pada masa ini, banyak partai politik yang tampil dengan basis ideologi tertentu, baik yang bersumber dari agama ataupun ideologi lainnya. Fenomena yang menunjukkan kecenderungan baru dalam politik di Indonesia ini, juga melibatkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, terutama dengan mendirikan partai politik tertentu yang dianggap sebagai representasi dari NU itu sendiri, yakni PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Secara khusus, penelitian ini berusaha memotret bagaimana peran NU dalam dunia politik di Indonesia, terutama yang direpresentasikan oleh PKB pada masa transisi tersebut (1998-2004). Kesimpulan yang menarik yang dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa langkah NU membentuk PKB pada saat itu dianggap sebagai

langkah yang tepat untuk merespon kebutuhan masyarakat akan kepastian politik yang tengah berada dalam kekacauan, terlepas dari keputusan NU untuk tidak berpolitik praktis—kembali pada khittah 1926.

Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa dalam penelitian ini, keberadaan dan peranan organisasi NU tidak dibatasi pada periode tertentu saja, seperti periode transisi kekuasaan dari rezim Orde Baru menuju era Reformasi. Penelitian ini lebih banyak diarahkan untuk memotret perjalanan NU sebagai organisasi sosial keagamaan, dan bagaimana hubungan serta pengaruhnya terhadap kondisi politik di Indonesia, terutama peran tokoh-tokoh NU yang dianalisis dari perspektif politik identitas.

Secara lebih detail, berikut adalah perbandingan ringkas antara penelitian tentang politik identitas keagamaan NU ini dengan beberapa penelitian di atas. Dalam tabel:

Tabel 1.1: *Perbandingan Penelitian*

Judul Penelitian	Fokus Bahasan	Pendekatan Penelitian	Metode Analisa	Objek Penelitian
<i>Hubungan Politik Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Order Baru</i>	Historiografi politik Orde Baru dan eksistensi NU di bawah kekuasaan Orde Baru	Kualitatif	Deskriptif-Analitik	Fenomena politik akomodatif yang dibangun Orde Baru
<i>Merunut Identitas Islam Indonesia, Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI, dan MMI</i>	Identitas gerakan dan corak politik yang ditampilkan oleh organisasi sosial keagamaan, khususnya NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI.	Kualitatif	Analisis Dekonstruksi	Organisasi sosial keagamaan NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI di Yogyakarta
<i>Eksistensi Nahdlatul Ulama dalam</i>	Kondisi politik Indonesia pada masa transisi	Kualitatif	Deskriptif-Analitik	Organisasi NU, terutama

<i>Dunia Politik pada Masa Transisi Kekuasaan di Indonesia (1998-2004)</i>	kekuasaan dari rezim Orde Baru menuju Era Reformasi, dan bagaimana peran NU pada masa transisi tersebut.			yang diwakili oleh tokoh-tokoh NU yang menjadi bagian dari PKB.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

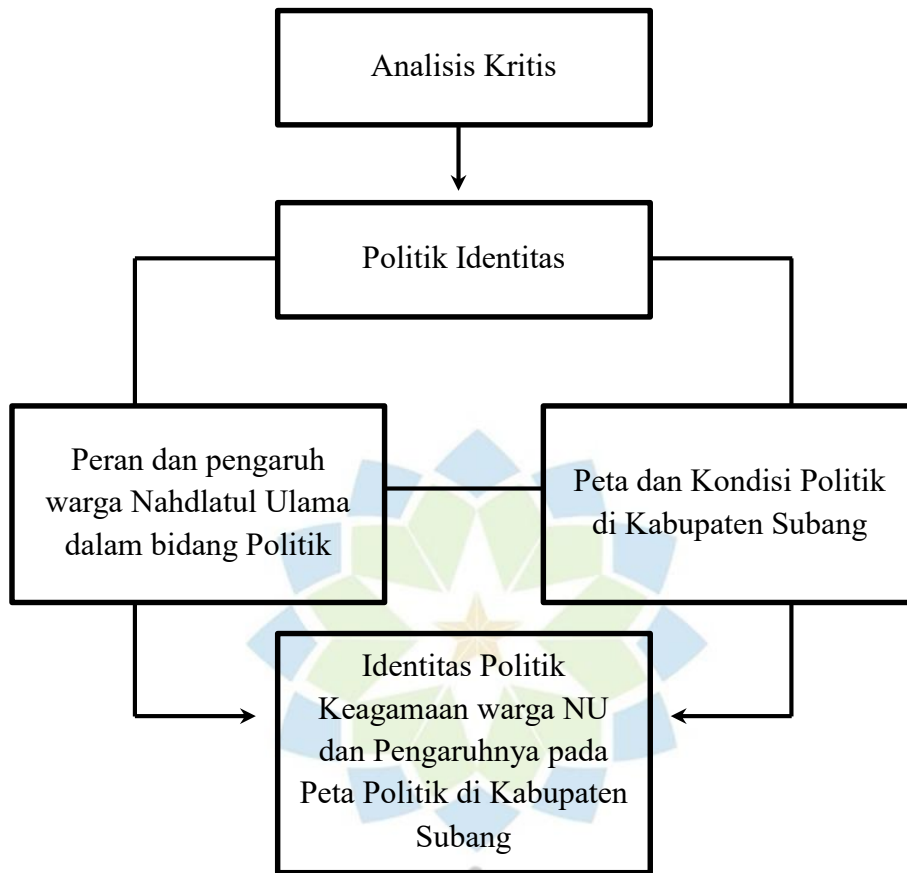
Politik identitas adalah bentuk politik yang saat ini marak terjadi, khususnya di Indonesia, di mana identitas keagamaan, suku, afiliasi ideologis, menjadi isu-isu sentral yang disebarakan di masyarakat untuk memengaruhi pilihan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilih. Terlepas dari kepentingan politis yang seringkali membuat lawan hari ini akan menjadi kawan esok hari, politik identitas tetap membawa bahasa tertentu yang pemaknaannya bisa memberikan batasan-batasan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya di masyarakat. Penegasan batas berupa identitas ini tentu saja memiliki kemungkinan untuk berujung pada konflik horisontal antar masing-masing kelompok identitas yang ada. Pada tingkat akar rumput atau masyarakat, isu-isu dan identitas yang menjadi muasal konflik yang dibangun pada perhelatan politik tersebut akan sulit untuk diredam, bahkan ketika para elit politik sudah mulai merubah kebijakan politiknya. Apalagi jika isu atau identitas yang dibangun tersebut didasarkan pada nilai-nilai teologis keagamaan.

Setiap bentuk politik memang merupakan politik identitas, dan setiap identitas selalu bersifat politis. Idealnya, politik identitas ini menjadi sarana bagi kelompok atau masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya, terutama untuk mendapatkan pengakuan yang setara (*equal recognition*). Dengan itu, maka demokrasi bisa berjalan secara lebih adil dan baik. Namun demikian, dalam fakta kesehariannya, politik identitas justru lebih banyak dijalankan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya kepentingan elit politik dan aktor-aktor politik untuk membangun citra semu yang ironisnya juga ditanggapi oleh masyarakat. Ada saja masyarakat yang percaya dengan citra semu tersebut. Padahal aktor politik pada hari ini lebih banyak menunjukkan wajah yang mendua. Mereka bisa membangun identitas A untuk situasi tertentu, dan berubah menjadi identitas B untuk kondisi lainnya.

Hal inilah yang menjadi tantangan utama bagi NU, sebagai organisasi kemasyarakatan yang meletakkan dirinya sebagai organisasi penengah dengan pandangan keagamaan yang moderat (*wasith*), serta organisasi yang mengedepankan politik kebangsaan yang berfokus pada maslahat umat. Apa yang akan dilakukan NU dalam konteks politik di pusat ataupun daerah misalnya, akan sangat menentukan bagaimana identitas NU dan keteguhannya di depan khittah 1926 yang menjadi modal terbesarnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Dalam penelitian ini, keberadaan dan peran NU, khususnya yang tampak pada Pilkada di Subang, terutama ketika secara kultural NU memiliki warga terbesar di Subang, dan terdapat Partai Politik yang berafiliasi langsung dengan mereka yang mengikuti Pilkada (PKB), akan dianalisis berdasarkan model politik identitas Bourdieu.

Dalam rumusan Bourdieu, politik identitas adalah upaya para aktor politik guna mendapatkan dominasi dalam medan politik, dengan cara meraih legitimasi dan pengakuan publik di satu sisi, dan menjaga citra yang dibangun dengan mempertahankan otoritas tertentu di sisi lainnya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam penelitian ini, identitas NU akan dikaji dalam konteks politik, seraya dikaitkan dengan tindakan-tindakan politik para pengurus atau warganya sebagai aktor politik. Bagaimana upaya NU mempertahankan keputusannya untuk tetap berpegang pada khittah 1926, yang berarti tidak lagi terjebak dan terlibat dalam kepentingan politik praktis di satu sisi, dan tarikan para aktor politik yang menjadi bagian dari NU itu sendiri (para kader NU) pada sisi lainnya. Bagaimana NU memperlakukan para aktor politik yang juga menjadi warganya, seraya menegaskan posisi kulturalnya di masyarakat sebagai organisasi yang ingin meningkatkan kesejahteraan para warganya, dan umat Islam pada umumnya. Secara lebih khusus, penelitian ini nantinya akan menganalisis bagaimana peran, pengaruh, dan dampak NU terhadap peta dan kondisi politik di Kabupaten Subang dalam kerangka politik identitas, untuk kemudian bisa diketahui bagaimana sikap, nilai-nilai, dan kebijakan yang diambil yang menjadi basis identitas politik NU secara keseluruhan. Dalam bagan:

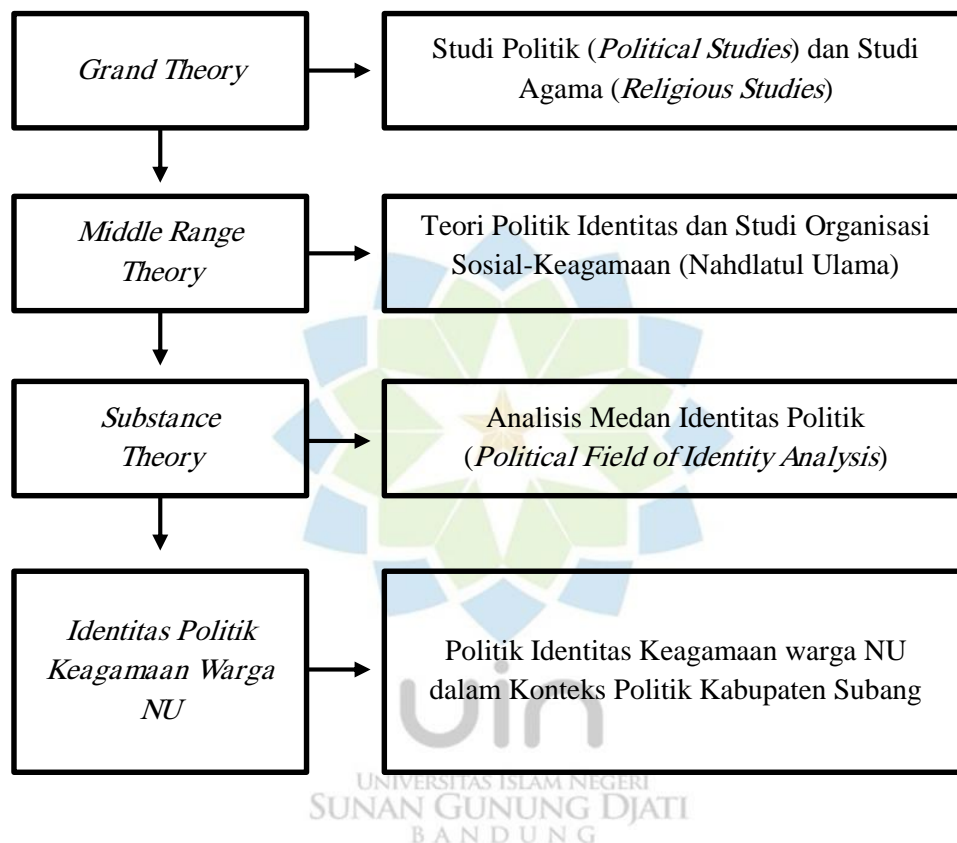
Bagan 1.1: Kerangka Berpikir Penelitian



Adapun teori-teori yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, sebagaimana sudah disebutkan pada bagian awal bab ini, adalah teori-teori yang berkembang dalam bidang: (1) Studi politik (*political studies*), yang secara khusus diarahkan pada kajian tentang sosiologi politik (*sociology of politics*); dan (2) Studi agama (*religious studies*). Keduanya adalah disiplin keilmuan yang menjadi landasan teoritis utama (*grand theory*) untuk penelitian ini. Dalam studi politik, yang secara spesifik akan dibahas tentang politik identitas (*identity politics*) dalam perspektif teori sosial, penulis menggunakan model “*political field of identity*” dari Heinrich Wilhelm Schafer yang mengambil rumusan teori sosial Pierre Bourdieu. Sedang dalam kajian tentang studi agama (*religious studies*) akan lebih dikhususkan pada pembahasan tentang hubungan Islam dengan politik di Indonesia yang dalam hal ini direpresentasikan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kajian derivatif dari dua

bidang utama tersebut (studi politik dan studi agama), yakni kajian terkait politik identitas dalam kerangka teori sosial, dan kajian tentang organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), menjadi *substance theory* untuk penelitian ini. Dalam Bagan:

Bagan 1.2: *Landasan Teori Penelitian*



G. Sistematika Penelitian

Penulisan disertasi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yakni; (1) Bab Satu: Pendahuluan; (2) Bab Dua: Landasan Teoritis; (3) Bab Tiga: Metode Penelitian; (4) Bab Empat: Pembahasan; dan (5) Bab Lima: Kesimpulan dan Saran.

Bab Pertama; Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan konteks penelitian hingga sistematika penulisan. Bab ini mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian sehingga diperoleh kejelasan tentang ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang melatarbelakangi, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, ringkasan metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan.

Bab Kedua; Landasan Teoritis Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai kerangka dan landasan teoritis dalam penelitian, yang mencakup teori-teori utama yang berkembang dalam bidang studi agama (*religious studies*), teori-teori organisasi (*organizational theories*), teori politik (*political theory*) dan kajian budaya (*cultural studies*), serta teori tentang politik identitas (*political identity*). Dalam bab ini akan diulas juga kajian tentang analisis kritis (*critical analysis*) sebagai metode analisis yang akan digunakan dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang akan diteliti dalam penelitian.

Bab Ketiga; Metodologi Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan alasan penggunaan pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, dalam hal ini penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik dan metode pengumpulan data, metode analisa data, termasuk jika diperlukan studi atas preposisi yang dibuat.

Bab Keempat; Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan, analisa, dan interpretasi atas data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah pada tahap sebelumnya, terutama untuk menemukan jawaban atas fokus dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam peta politik di Kabupaten Subang, Jawa Barat?; (2) Bagaimana pengaruh Nahdlatul Ulama dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Subang, Jawa Barat?; dan (3) Bagaimana politik identitas keagamaan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang, Jawa Barat? Semua pertanyaan masalah tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan sifat penelitian ini.

.Bab Kelima; Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa, interpretasi, dan bahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga mengemukakan beberapa saran terkait penelitian ini dan bagaimana peluang pengembangan atas topik terkait di masa mendatang.